

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor : 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase yang selanjutnya disingkat Peraturan BAPMI, tepatnya diatur pada Pasal 1 Huruf (a) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan di BAPMI dengan menggunakan Peraturan dan Acara ini yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.

Mengingat terdapat beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yaitu proses dan jangka waktu yang relative lama dan berlaut-larut karea ada beberapa tingkatan dalam hierarki pengadilan yang harus dilalui, identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat, sebab prinsip sidang yang dilakukan oleh Lembaga peradilan adalah pada dasarnya terbuka untuk umum.

Tentunya bagi pihak yang sudah mempunyai nama di kalangan dunia bisnis kurang begitu suka identitasnya dipublikasikan lewat kasus di pengadilan, karena khawatir kebonafidit-annya yang terjamin selama ini akan luntur khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya. Disamping itu juga karena peradilan yang ada di Indonesia saat in dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dunia usaha sering kali juga secara langsung atau tidak langsung merasa terpukul dengan system dan cara

kerja peradilan yang dianggap kurang tanggap terhadap kebutuhan ekonomi dunia usaha.¹

Seiring perkembangannya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase menemui beberapa masalah. Masalah utama adalah terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Masalah yang paling sering dihadapi dalam sengketa yang memuat klausula arbitrase adalah karena tidak puas atas putusan arbitrase maka sengketa diajukan ke Lembaga litigasi. Selain itu, atas putusan arbitrase yang bersifat final dan *binding*, pihak yang belum puas atau merasa putusan arbitrase tersebut ada yang salah akan mengajukan upaya hukum berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri. Upaya hukum ini diatur di dalam Pasal 70 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang memuat syarat limitative putusan arbitrase dapat dibatalkan. Tidak jarang juga yang melakukan upaya hukum dari tingkat banding, kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK). Padahal upaya hukum yang dilakukan hanya setingkat banding sebagai upaya hukum terakhir terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 ayat (4) UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun yang menjadi masalah adalah terkadang terdapat kekurangan atau bahkan kesalahan majelis hakim dalam memberikan pertimbangan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase, seperti contoh kasus berikut ini.

Terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama, para pihak tersebut adalah sebagai berikut :

¹ M. Husni. 2008. *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*. Sumatera Utara. Jurnal Equality. Vol. 13 No. 1. Universitas Sumatera Utara. Hal. 10.

- 1) PT. Nikko Securities Indonesia (selanjutnya disebut PT NSI) adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pasar modal sebagai Perusahaan Efek dan telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-01/PM-MI/1993 tanggal 22 Pebruari 1993. Salah satu kegiatan usahanya adalah menerbitkan Produk Investasi yang menawarkan kerjasama dengan Bank untuk menjualkan produk investasi yang dikeluarkan PT NSI kepada para nasabah bank terkait dan dalam hal ini PT NSI bergerak sebagai Manajer Investasi.
- 2) Sedangkan PT. Bank Permata Tbk. (selanjutnya disebut PT BP) adalah Bank Umum Nasional yang sudah *go public* dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. PT BP merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa perbankan di bawah pengawasan Bank Indonesia, selain itu juga menyelenggarakan kegiatan di bidang Pasar Modal sebagai Kustodian dan Wali Amanat di bawah pengawasan Bapepam-LK.

Selanjutnya PT NSI dan PT BP telah melakukan perjanjian kerjasama terhadap produk investasi yang dikeluarkan oleh PT NSI yaitu produk investasi dengan nama *Government Bonds Fund* (selanjutnya disebut GBF), dimana *Underlying Asset*²-nya adalah Obligasi Pemerintah. Produk Investasi GBF ini diterbitkan secara per seri dan ditawarkan secara mingguan per seri dan jangka waktu investasi setiap seri adalah 2 (dua) tahun. Sehingga dalam

² *Underlying Asset* adalah asset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan Sukuk. Sukuk adalah Surat Berharga Syariah Negara Ritel atau biasa disebut Sukuk Ritel, yang merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara yang dijual kepada Individu (Ritel) atau perseroan Warga Negara Indonesia.

setiap seri GBF, Investor yang membeli atau berinvestasi pada GBF ini bisa lebih dari satu Investor dan semua produk investasi GBF (yang dibeli para Investor) dalam satu seri GBF adalah sama jangka waktu investasinya (sama tanggal jatuh temponya) dan sama tanggal pelunasan awalnya (dalam hal ada Investor yang melakukan pencairan awal) maupun sama tanggal pembayaran atau pembagian hasil investasinya. Jumlah total Produk Investasi tersebut adalah 59 seri, yaitu GBF Seri 1 sampai dengan GBF Seri 59, kecuali GBF Seri 3 dan GBF Seri 13 tidak ada karena memang sengaja tidak diterbitkan oleh PT NSI.

Bagi nasabah dari PT BP yang berminat untuk membeli atau berinvestasi pada produk investasi GBF, nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Produk Investasi *Government Bonds Fund* (selanjutnya disebut “Formulir”) dan secara individual menandatangani Kontrak Pengelolaan Dana *Government Bonds Fund* (selanjutnya disebut “KPD”) dengan PT NSI, yang memiliki masa periode pengelolaan selama 2 (dua) tahun (jangka waktu KPD). Nasabah yang telah terikat dengan KPD tersebut untuk selanjutnya disebut “Investor”. Setiap KPD terdapat nomor dan tanggal yang berbeda untuk setiap Investor. Jadi, KPD ini merupakan dasar hubungan hukum (secara bilateral) antara Investor dengan PT NSI.

Hubungan hukum antara PT NSI dan PT BP adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Investasi Nomor 249/BP/CL/XI/06 tertanggal 21 November 2006, sebagaimana telah di addendum dengan addendum I Nomor : 069/BP/CL/III/07 tertanggal 03 April 2007 (yang

selanjutnya disebut PKP). PKP tersebut memiliki jangka waktu 3 (tiga) tahun dan berlaku surut terhitung yaitu mulai tanggal 28 September 2006 sampai dengan 28 September 2009 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

PKP tersebut diperjanjikan bahwa PT NSI menjalankan kegiatan usahanya dengan mengelola dan/atau menginvestasikan dana investor pada pasar uang dan/atau perusahaan lainnya, sedangkan PT BP adalah sebagai Agen Penjual yang memiliki jaringan cabang di seluruh Indonesia melakukan penjualan Produk Investasi yang diterbitkan dan dikelola oleh Manajer Investasi kepada para nasabah dari PT BP.

Tugas atau kewajiban para pihak berdasarkan PKP adalah sebagai berikut :

1. PT NSI bertindak dan berkedudukan sebagai Manajer Investasi, yang menerbitkan dan mengelola Produk Investasi yaitu GBF.
2. PT BP bertindak dan berkedudukan sebagai Agen Penjual, yang menawarkan atau menawarkan dan menjual Produk Investasi GBF kepada Investor yang tidak lain adalah nasabah dari PT BP, berhubungan atau berhadapan dengan investor, mempresentasikan atau menerangkan kepada investor mengenai isi Memo (setiap informasi tertulis dari produk yang memuat arahan investasi, manfaat investasi, resiko investasi dan fitur-fitur produk investasi antara lain penawaran produk, jangka waktu investasi, batasan penyertaan, hasil investasi dan perpajakan), dan meminta investor

untuk menandatangani Formulir dan KPD (bagi investor yang berminat untuk membeli atau berinvestasi).

Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perselisihan antara PT BP dengan PT NSI, perselisihan tersebut berawal dari Manajer Investasi tidak memenuhi kewajibannya kepada Para Investor berdasarkan KPD atas produk seri 8 (delapan) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan), yaitu pembayaran hasil investasi yang menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

Para investor sudah mengajukan komplain kepada Agen Penjual dan Agen Penjual telah mengingatkan Manajer Investasi agar memenuhi kewajibannya tersebut kepada Para Investor. Selanjutnya Manajer Investasi telah meminta agar Agen Penjual memfasilitasi pertemuan dengan para Investor, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Agen Penjual dengan alasan karena Manajer Investasi belum memberikan kejelasan mengenai solusi yang akan disampaikan kepada para Investor.

Akhirnya dengan inisiatif sendiri dan tanpa perintah atau permintaan dari Manajer Investasi, Agen Penjual memberikan dana talangan dan memenuhi kewajiban Manajer Investasi tersebut dengan membayar Hasil Investasi langsung kepada para Investor yang seluruhnya berjumlah Rp 15.371.284.394,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Kemudian Agen Penjual meminta penggantian kepada Manajer Investasi atas pemabayaran yang dilakukan Agen Penjual. Namun, Manajer Investasi belum atau tidak bersedia membayar atau menggantinya. Atas perselihan

tersebut selanjutnya PT BP mengajukan penyelesaian sengketa yang terjadi antara PT BP dengan PT NSI ke depan forum Arbitrase BAPMI.

Dasar pengajuan penyelesaian sengketa melalui BAPMI adalah berdasarkan perjanjian yang memuat klausula arbitrase yaitu :

1. Ketentuan Pasal 21 Ayat (2) perjanjian PKP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bila setelah 60 (enam puluh) Hari Kerja penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan yang berhubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Perjanjian ini) wajib diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa nomor 30 Tahun 1999 berikut semua perubahannya, yang keputusannya mengikat Para Pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”

2. Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) perjanjian KPD, yang berbunyi sebagai berikut :

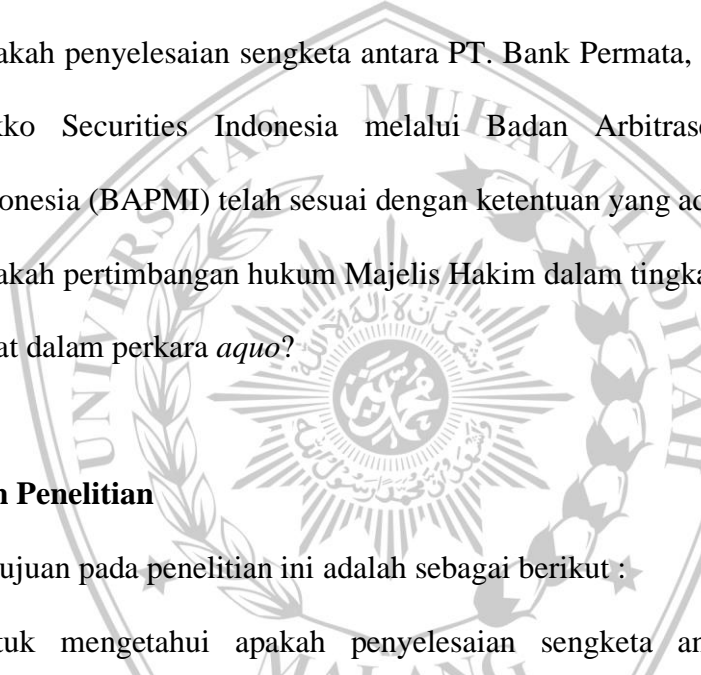
“Setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, akan diselesaikan melalui majelis arbitrase nasional Indonesia pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan tunduk pada UndangUndang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya dan atau ketentuan penggantinya.”

Atas permohonan penyelesaian sengketa melalui BAPMI yang diajukan oleh PT BP, BAPMI telah mengeluarkan putusan Nomor Reg. : BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011 tanggal 18 September 2012 yang telah diserahkan dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Pendaftaran Nomor : 27/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT.PST tanggal 15 Oktober 2012.

Setelah di daftarkannya putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat PN JKT PST) maka PT NSI mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase Nomor : BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011. Atas permohonan tersebut Majelis Hakim PN JKT PST mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT NSI.

Atas putusan PN JKT PST Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST maka PT BP dan BAPMI mengajukan upaya hukum banding di Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) dengan Nomor : 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 sebagai upaya hukum terakhir atas putusan pembatalan putusan arbitrase. Terhadap pengajuan permohonan banding tersebut Majelis Hakim di MA mengabulkan permohonan banding PT BP dan BAPMI. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA MELAWAN PT. BANK PERMATA, TBK. DI BADAN

ARBITEASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI) (Studi Kasus Putusan PN Nomor 513/PDT.G-ARB.2012/PN.JKT.PST dan Putusan MA Nomor 169 K.Pdt.Sus-Arbt/2013)”.


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian sengketa antara PT. Bank Permata, Tbk. dengan PT. Nikko Securities Indonesia melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) telah sesuai dengan ketentuan yang ada?
2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat Banding sudah tepat dalam perkara *aquo*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa antara PT. Bank Permata, Tbk. dengan PT. Nikko Securities Indonesia melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat Banding sudah tepat atau belum dalam perkara *aquo*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis : memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam mengetahui hasil analisa hukum terkait Penyelesaian Sengketa Antara PT. Nikko Securities Indonesia Melawan PT. Bank Permata, Tbk. di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus Putusan PN Nomor 513/PDT.G-ARB.2012/PN.JKT.PST dan Putusan MA Nomor 169 K.Pdt.Sus-Arbt/2013), juga sebagai syarat Penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bagi Pemerintah : hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah apabila akan melakukan perbaikan pranata hukum arbitrase di Indonesia, khususnya dalam hal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan turunannya;
3. Bagi Masyarakat : memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan, khususnya kepada pelaku usaha di Indonesia yang bergerak dalam bidang perdagangan tentang penyelesaian sengketa arbitrase yang dalam pelaksanaannya terkendala banyak masalah dan seperti apa cara penyelesaian yang tepat, khususnya tentang sengketa bisnis antara PT. Nikko Securities Indonesia dengan PT. Bank Permata, Tbk.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yakni menambah wawasan terkait Penyelesaian Sengketa Antara PT. Nikko Securities Indonesia Melawan PT. Bank Permata, Tbk. di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia sekaligus berguna sebagai sumber rujukan bagi Pemerintah dalam melakukan revisi hukum arbitrase yakni, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan turunannya yang mana masih menyisakan celah sehingga dalam penerapannya sering terjadi masalah (penyelesaian sengketa yang menimbulkan sengketa baru).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, sebagaimana yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki yang merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

1) Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode yuridis normative. Penelitian yuridis normative yakni menggunakan studi hukum normative berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 29.

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52.

Sedangkan dalam menerapkan metode ini digunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan melalui *statue approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *case approach* (pendekatan kasus). Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti akan mengkaji dan memahami hierarki dan asas-asas dalam perundang-undangan. Pendekatan kasus peneliti menggunakan *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.⁵

2) Jenis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999 tentang Arbitrase), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁵ Peter Mahmud. *Op.cit.* Hal.136

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XII/2014, Keputusan BAPMI Nomor: KEP-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan dan Acara BAPMI, Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor 04/BAPMI/12/2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Lampiran Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor Kep-05 BAPMI/12/2002 tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Afiliasi bagi Arbiter dan Mediator Badan Arbitrase Pasar Modal, Putusan Arbitrase Nomor BAPMI-004/ARB-03/2011, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/Pdt.Sus-Arbt/2013.⁶

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari buku-buku literatur, dokumen resmi serta penelitian terdahulu, juga makalah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, prosiding, dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik terkait tentang pokok permasalahan dalam penelitian. Serta bahan hukum sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai bahan hukum pendukung yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hal. 181.

memuat perkembangan hukum di dalamnya dan bersifat menguatkan bahan hukum primer.⁷

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus yang membantu menunjang pemahaman, memberi petunjuk, maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian hukum/ skripsi ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yakni dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya penulis membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu, pengumpulan juga dilakukan dengan membaca literatur, makalah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan artikel lain yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

4) Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan melalui Teknik pengumpulan di atas, selanjutnya dilakukan penginventarisiran bahan hukum, kemudian pengklasifikasian, lalu penganalisisan menggunakan Teknik analisis isi atau *content analysis*, yang merupakan suatu Teknik untuk membuat kesimpulan objektif dan sistematis dalam mengidentifikasi

⁷ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 54.

karakter khusus yang terdapat dalam suatu pesan atas bahan hukum tertentu. Analisa data dilakukan dengan cara memaparkan isi hukum dengan menguraikannya secara lengkap dan jelas untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis melalui proses Analisa dan dikaitkan dengan teori, konsep serta doktrin para ahli hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang di dalamnya terdiri atas sub bab agar mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan in terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang yang menjelaskan akar permasalahan yang diangkat, rumusan masalah yang memuat permasalahan, tujuan penulisan yang menjadi pencapaian dalam penulisan dan manfaat yang menjelaskan kegunaan bagu penulis, pemerintah dan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi uraian teori yang digunakan untuk melandasi penulisan hukum ini. Dalam hal ini menguraikan tentang pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa Analisa atau kajian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini terdapat sub bab yakni kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisikan inti dari hasil pembahasan yang didapatkan dalam penulisan ini. Sedangkan saran berisikan rekomendasi dari penulis atas beberapa permasalahan yang diangkat.

